



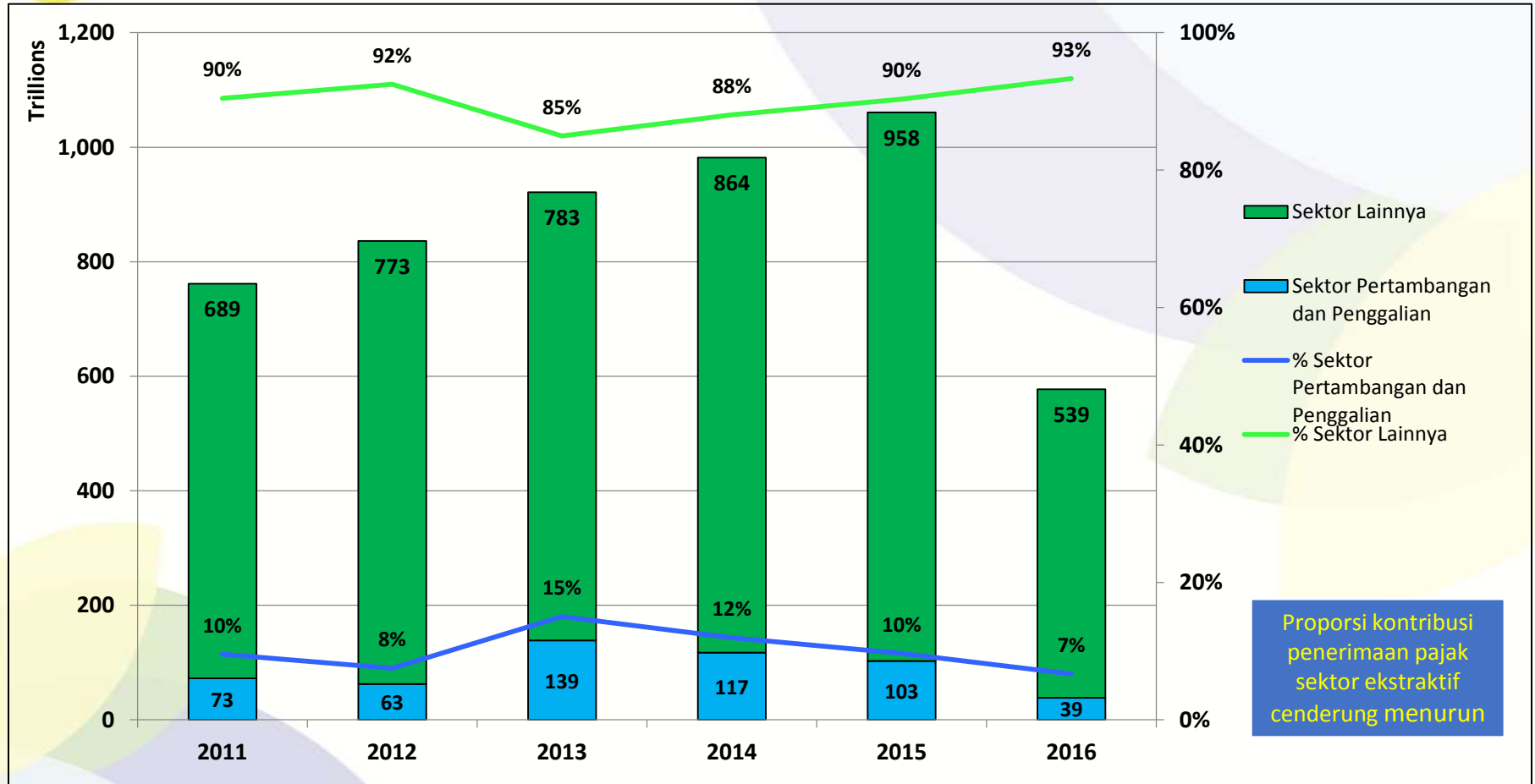
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERPAJAKAN INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA

AGUSTUS 2016



KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR EKSTRAKTIF



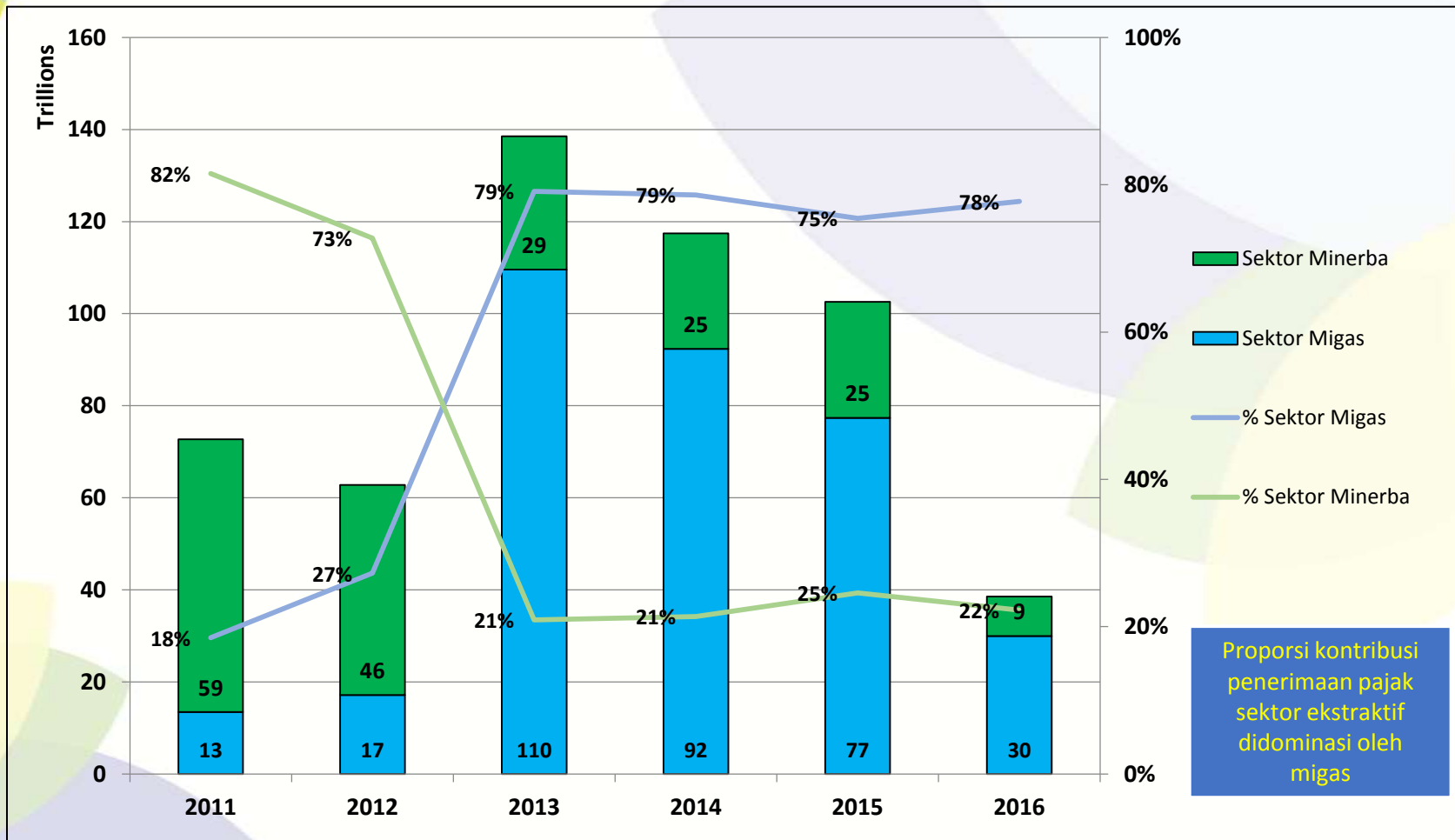
Sumber: Dashboard Penerimaan tanggal 19 Agustus 2016

Keterangan:

1. Penerimaan pajak tahun 2016 sampai dengan 19/08/2016
2. Jasa Pertambangan termasuk dalam Sektor pertambangan dan penggalian



PENERIMAAN SELURUH JENIS PAJAK SEKTOR EKSTRAKTIF

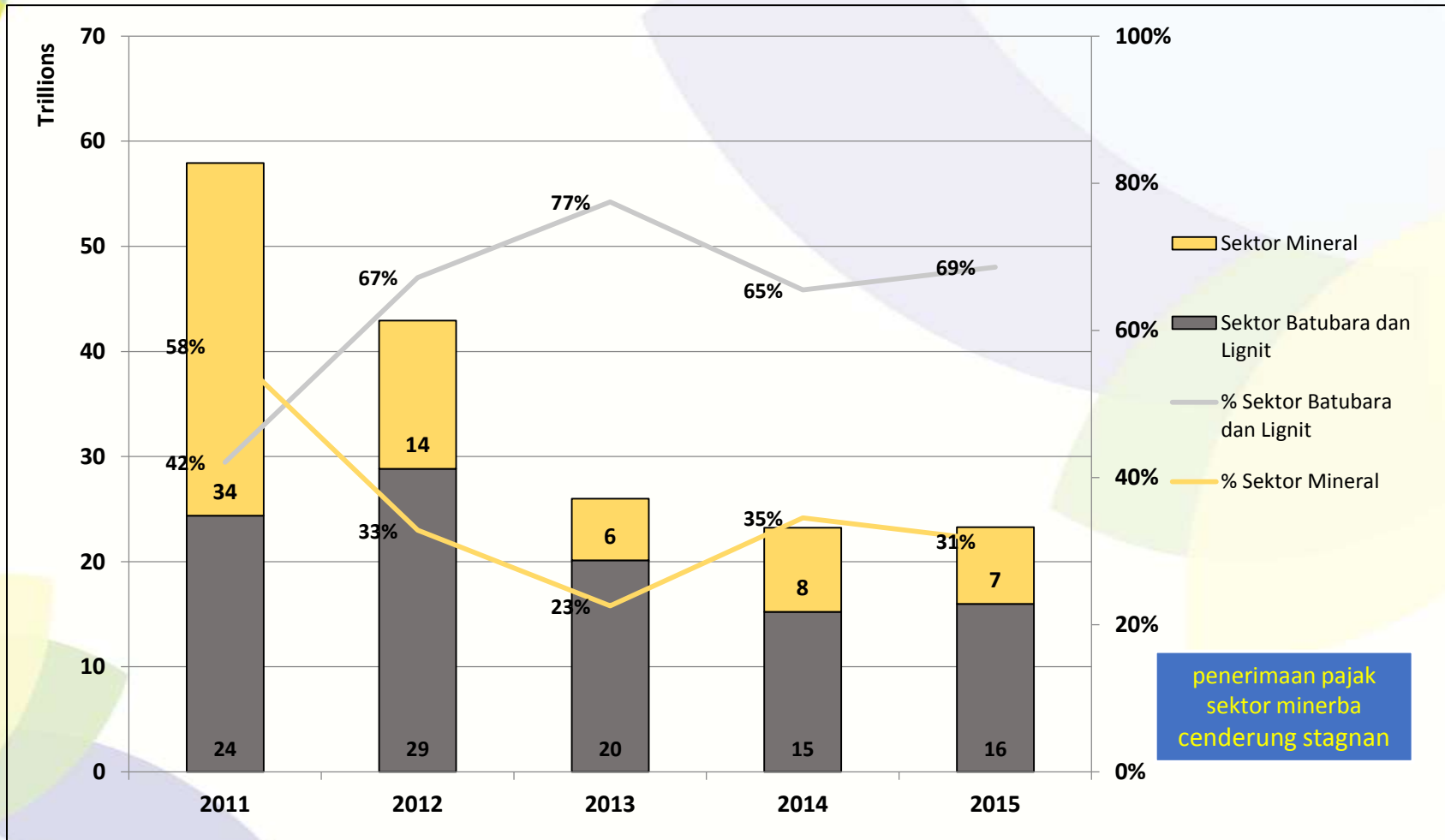


Sumber: Dashboard Penerimaan tanggal 19 Agustus 2016

Keterangan: Penerimaan pajak tahun 2016 sampai dengan 19/08/2016



PENERIMAAN SELURUH JENIS PAJAK SEKTOR MINERBA



Sumber: Dashboard Penerimaan tanggal 19 Agustus 2016

Keterangan: Tidak termasuk jasa pertambangan

penerimaan pajak
sektor minerba
cenderung stagnan



LANGKAH – LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN DJP

Pertukaran Data Dan/atau Informasi (*Exchange Of Information*)

Pertukaran Informasi dengan Otoritas Negara Mitra (Asia Pasifik, OECD, G20) dilakukan sesuai ketentuan dalam:

1. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
2. *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA);
3. Konvensi;
4. Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (*Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement*);
5. Persetujuan antar Pemerintah (*Intergovernmental Agreement/IGA*)
6. Perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

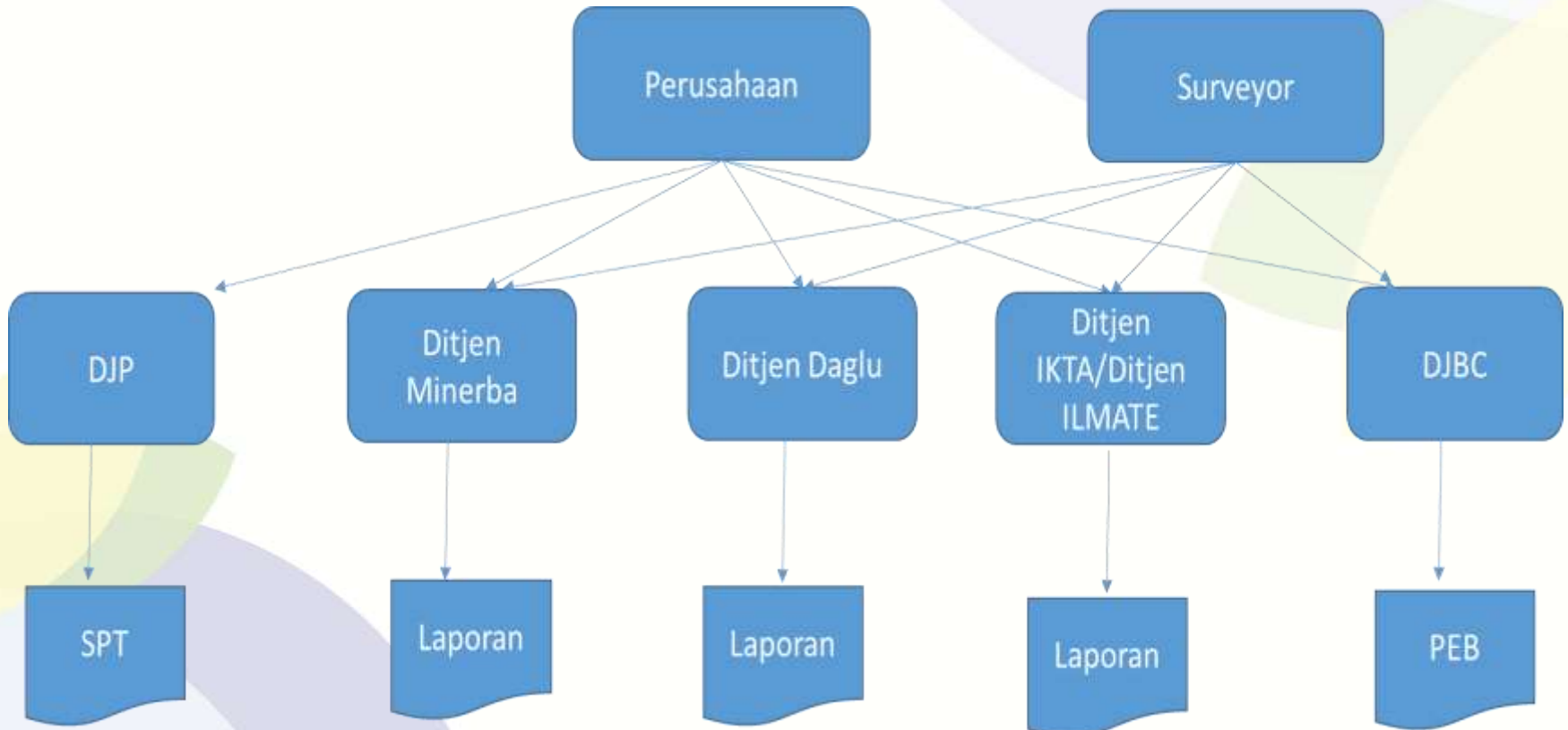




LANGKAH – LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN DJP

Kerjasama dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP) melalui PP 31 Tahun 2012 dan turunannya tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

Terkait Minerba:





LANGKAH – LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN DJP

Daftar instansi yang diwajibkan menyampaikan data terkait pertambangan

PMK	No Urut	Instansi	Jenis Data
39	37	Seluruh Pemda Provinsi	XIV Data Pertambangan XV Persetujuan RKAB
191	17	Kementerian perdagangan	I Data Profil perizinan II data SKA
191	50	Ditjen Minerba	I Data KK dan PKP2B II Data IUP/IUPK III Royalti/DHPB oleh KK/PKP2B IV Royalti IUP V Data IUJP VI Data cadangan VII Data Produksi dan Penjualan Minerba oleh KK/PKP2B VIII Data Produksi dan Penjualan Minerba oleh IUP/IUPK IX RKAB KK/PKP2B X RKAB IUP XI HPB XII HBA
	51	Pusdatin Kem ESDM	I Data Produksi, Penjualan, ekspor, impor migas, batubara II Data Produksi, Penjualan, ekspor, impor mineral
132	31	PT Sucofindo	I Data Eksportir II Uraian Barang III Komoditas IV Pengapalan V Identitas Surveyor VI Lap Surveyor
132	32	PT Surveyor Indonesia	idem
	33	PT Carsurin	idem
	34	PT Geoservices	
95	3	DJBC	VI PEB
95	14	BI	II Informasi DHE





LANGKAH – LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN DJP

Pemetaan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Analisis terkait data internal dan eksternal, baik bersifat data makro maupun data mikro.

Monitoring dan evaluasi pengawasan Wajib Pajak sektor Minerba, termasuk dengan bekerjasama dengan Korsup KPK





Peran Stakeholders EITI

PEMERINTAH

- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi terkait pengawasan *compliance* pelaku usaha industri ekstraktif
- Memberikan pelayanan prima terhadap industri, menuju layanan terpadu dan *e-Government*

INDUSTRI

- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk kepatuhan terkait perpajakan
- Menerapkan *Good Corporate Practice* dan *Good Tax Governance*

PUBLIK

- Meningkatkan *awareness* tentang pentingnya pajak untuk negara serta memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari diri pribadi
- Ikut berperan menjadi pemberi informasi (*whistleblower*)



amnesti pajak

ungkap . tebus . lega



Terima kasih

